

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Yenci Roma Uli Sihaloho

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara, Indonesia

Email: romauli.yenci@gmail.com

Keywords:

*Budget Planning;
Budget Execution;
Procurement of Goods and
Services;
Budget Absorption*

Abstract

Budget absorption is an important indicator in measuring the success of local governments in realizing planned budgets. However, various obstacles are still found in optimizing budget absorption in various government institutions, including the DKI Jakarta Provincial Government. This research aims to identify and analyze the factors influencing budget absorption in the DKI Jakarta Provincial Government. The study used primary data with direct data collection using a questionnaire. The population in this study was 79 civil servants (ASN) within the DKI Jakarta Provincial Government, using a simple random sampling method. The study employed a quantitative method with a descriptive analysis approach and SEM (Structural Equation Modeling) analysis, using the SmartPLS version 4 program. The results showed that budget planning partially had a positive and significant effect on budget absorption, budget execution and procurement of goods and services had no effect on budget absorption, and simultaneously, budget planning, budget execution, and procurement of goods and services had an effect on budget absorption in the DKI Jakarta Provincial Government. This research concludes that budget planning is the main factor influencing budget absorption, while budget execution and procurement of goods and services act as supporting factors whose effectiveness depends on the quality of planning. To improve budget absorption, it is necessary to strengthen the quality of more accurate and measurable budget planning, as well as to improve coordination among work units in budget execution and procurement of goods and services.

Kata Kunci:

Perencanaan Anggaran;
Pelaksanaan Anggaran;
Pengadaan Barang Dan Jasa;
Penyerapan Anggaran

Abstrak

Penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Namun, masih ditemukan berbagai kendala dalam optimalisasi penyerapan anggaran di berbagai instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan data primer dengan pengumpulan data secara langsung menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjumlah 79 orang dengan metode simple random sampling. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis SEM (Structural Equation Modeling) serta menggunakan program SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, serta secara simultan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang & jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi penyerapan anggaran, sementara pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa berperan sebagai faktor pendukung yang efektivitasnya bergantung pada kualitas perencanaan. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran, diperlukan penguatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih akurat dan terukur, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistemnya presidensial dengan sifat parlementer. Tiga lembaga dalam pemerintahan di Indonesia yang saling bermitra yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah daerah Tingkat I dan pemerintah daerah Tingkat II). Luas wilayah negara yang sekaligus pemerintahan Indonesia yaitu 1.905 juta km² untuk luas daratan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibuatlah peraturan yang mengatur pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta terakhir saat ini diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam Ketentuan Umumnya, terdapat penjelasan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan secara penuh kecuali urusan pemerintah pusat yang bersifat absolut diantaranya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pelimpahan kewenangan didasari atas harapan kepada pemerintah daerah yang lebih mengenal kebutuhan daerahnya secara langsung sehingga kebijakan yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran.

Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) di tiap-tiap daerah membuat peraturan yang mengatur daerahnya secara spesifik dan mampu untuk mengimplementasikannya. Dalam tatanan pemerintahan daerah, Kepala Daerah sebagai pimpinan dari eksekutif sedangkan Ketua DPRD sebagai pimpinan dari legislatif. Kolaborasi 2 lembaga di pemerintahan daerah ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahulukan kepentingan rakyat.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintahan daerah yang hanya berada pada Pemerintah Daerah Tingkat I dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur. Seluruh kegiatan pemerintahan berada pada lingkup provinsi dan menjadi pembeda dengan pemerintahan daerah yang lain. Tahap perencanaan pemprov DKI Jakarta diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta sedangkan untuk penganggaran diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

Tata kelola pemerintahan berbasis kinerja juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam anggaran berbasis kinerja terlihat pada perencanaan, pelaksanaan dan

penyerapan anggaran. Hal ini terlihat pada korelasi antara anggaran dengan output dan incomenya serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tersusun atas anggaran pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah), anggaran belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer), dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu gambaran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran daerah terhadap perencanaan yang telah dibuat. Penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan berkorelasi positif dengan pelaksanaan anggaran dan penyerapannya di akhir tahun anggaran. Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penyerapan anggaran dinilai cukup tinggi, hal ini memperlihatkan tingginya transaksi keuangan yang terjadi dari pemerintah kepada masyarakatnya, namun hal tersebut dirasa masih bisa dioptimalkan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintahan di Indonesia, namun dalam penelitian ini dibatasi pada tiga faktor, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Perencanaan anggaran menurut (Ledy et al., 2017) merupakan proses dalam menentukan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan (Fadlina et al., 2022) yang menyatakan bahwa perencanaan terdiri dari aktivitas-aktivitas, strategi, dan operasionalisasi. Perencanaan anggaran yang mengalami peningkatan akan mempengaruhi peningkatan penyerapan anggarannya, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran, sebagaimana disampaikan oleh (Fadlina et al., 2022) dan selaras dengan Zakiah, dkk (2021) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hubungan ini juga ditunjukkan oleh berbagai penelitian lain, seperti Yolla Safpremi dan Annie Mustika Putri (2022), Dewi Sartika dan Sapna Julita Roza (2024), Ledy S. Gagola, dkk (2017), Muhamad Syahwildan dan Irma Damayanti (2022), Nurfadila Rizky Pratiwi, dkk (2023), (Aprillia, 2024), Su Voon Khoo, dkk (2024), Heriberta, dkk (2018), Fadlina Almi, dkk (2022), Zakiah, dkk (2021), Darwis Lannai dan Asbi Amin (2020), Kadek Krisna Desiantini dan Made Aristia Prayudi (2021), Novita Dayang Sari, Maria, Desi Indriasari (2023), Kennedy, dkk (2020), Mulky Alrasi Hutagalung, dkk (2024), Nur Hidayati, dkk (2024), Retno Ambarwati Subhiningsih, dkk (2023), Safriansah, dkk (2021), Rahmawati, dkk (2024), Didit Supriyadi, dkk (2024), Neni Anggraeni, dkk (2023), dan Fara Fitriyani, dkk (2022). Sebaliknya, beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, seperti Rika & Jouzar (2020), Noordiana, dkk (2020), Kaniya, dkk (2022), Dion & Eka (2022), dan Raden & Heni (2025).

Pelaksanaan anggaran menurut Rika & Jouzar (2020) adalah melaksanakan yang sudah direncanakan dengan tepat waktu. Hal ini selaras dengan penelitian Ledy, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran melingkupi persoalan internal satuan kerja serta proses pencairan anggaran. Menurut Neni, dkk (2023), pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, hal ini sesuai dengan penelitian Didit, dkk (2024) dan Kaniya, dkk (2022) yang juga menyatakan hal serupa. Beberapa penelitian lainnya mendukung hubungan positif pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, seperti disampaikan Ledy S. Gagola, dkk (2017), Muhamad Syahwildan dan Irma Damayanti (2022), Aprillia Nilasari (2024), Heriberta, dkk (2018), Zakiah, dkk (2021), Novita Dayang Sari, dkk

(2023), Mulky Alrasi Hutagalung, dkk (2024), Safriansah, dkk (2021), Kaniya Wardayani, dkk (2022), Didit Supriyadi, dkk (2024), Neni Anggraeni, dkk (2023), dan Susi Karyawati, dkk (2025). Namun, terdapat juga penelitian yang menyatakan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, misalnya Rika & Jouzar (2020), Noordiana, dkk (2020), Fadlina, dkk (2022), dan Raden & Heni (2025).

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses pemenuhan kebutuhan dalam menjalankan program pemerintah. Hal ini sesuai dengan Yolla, dkk (2022) dan sejalan dengan penelitian Fadlina, dkk (2022) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan APBD. Menurut Rika & Jouzar (2020), pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini juga diperkuat oleh Novita, dkk (2023). Beberapa penelitian lain juga menunjukkan pengaruh positif pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran, seperti Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Faroug Ishak (2020), Yolla Safpremi dan Annie Mustika Putri (2022), Ledy S. Gagola, dkk (2017), Fadlina Almi, dkk (2022), Novita Dayang Sari, dkk (2023), dan Kaniya Wardayani, dkk (2022). Namun demikian, penelitian Noordiana, dkk (2020) menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran? Apakah terdapat pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran? Dan apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran?

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen keuangan publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di pemerintahan daerah, serta menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN), dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta efisiensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2019:55) merupakan segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk diteliti guna mendapatkan informasi dan menentukan kesimpulan. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada organisasi perngakat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Waktu penelitian dilakukan tahun 2025 dengan referensi beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan diberbagai instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Populasi, Teknik sampel dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah aparatur sipil negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ruang lingkup kerja Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Biro, Kota Administrasi / Kabupaten Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan.

Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random sampling yang dilakukan kepada target sampel. Beragamnya OPD yang menjadi target sampel, diharapkan akan menggambarkan kompleksitas informasi atas proses penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Target sampel penelitian adalah 100 ASN di ruang lingkup Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Biro, Kota Administrasi / Kabupaten Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Metode Pengumpulan Data

Dalam bukunya, Sugiyono (2019:296) menyatakan bahwa Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuesioner, dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari responden berupa tulisan. Kuesioner dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait penulisan yang disebar kepada target sampel. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui *Google Forms* guna efektifitas penggunaan waktu.

Metode Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersumber dari data primer. Metode analisa data menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis SEM. Alat analisa pada penelitian ini yaitu Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS). Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019 : 206) “Metode deskriptif adalah metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul. Analisis memberikan gambaran atas suatu fenomena atau kondisi sebagaimana adanya, sehingga simpulan yang akan dibentuk hanya berkaitan pada kondisi yang diteliti saja. Pada penelitian ini, data yang

dimaksud adalah data hasil kuesioner dengan skala likert yaitu sangat tidak setuju (STS) bernilai 1, tidak setuju (TS) bernilai 2, cukup setuju (CS) bernilai 3, setuju (S) bernilai 4, dan sangat setuju (SS) bernilai 5.

$$\begin{aligned}\text{Rentang skala} &= \frac{\text{skor terbesar} - \text{skor terkecil}}{\text{Jumlah pilihan jawaban}} \\ &= \frac{5 - 1}{5} = 0,80\end{aligned}$$

Sehingga rentang skala yang digunakan sebagai dasar penilaian rata-rata indikator dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Nilai 1,00 – 1,80 dikategorikan sangat rendah
2. Nilai 1,81 – 2,60 dikategorikan rendah
3. Nilai 2,61 – 3,40 dikategorikan cukup
4. Nilai 3,41 – 4,20 dikategorikan tinggi
5. Nilai 4,21 – 5,00 dikategorikan sangat tinggi

Analisis SEM

Analisis data dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) akan memperlihatkan pengujian atas hubungan antar variabel dengan lebih komprehensif. Metode SEM dapat mengintegrasikan analisis faktor dan analisis jalur dalam satu model dengan teknik statistik yang relevan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat lunak SmartPLS digunakan berdasarkan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang mampu mengolah data dengan jumlah relatif kecil dan data yang tidak terdistribusi secara normal.

Outer model (model pengukuran)

1. Validitas konvergen

Validitas konvergen menguji seberapa tinggi korelasi antara indikator dengan variable latennya. Kesesuaian antar indikator digambarkan melalui skor pernyataan yang dihubungkan kepada variable latennya

2. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan menguji seberapa baik ukuran variabel terhadap konsep dan tidak terpengaruh dengan konsep lain. Ada 3 cara untuk mengetahui validitas diskriminan yaitu cross loading, fornell – lacker criterion, heteroit – monotrait ratio (HTMT). Hasil dari 3 cara perhitungan tersebut, uji validitas dikuatkan dengan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk masing-masing variable.

3. Reabilitas

Uji Realiability memastikan bahwa instrumen penelitian ini adalah akurat dan konsisten sehingga dapat disebut andal. Pengolahan data SmartPLS versi 4 memperlihatkan uji reabilitas melalui statistik Cronbach's Alpha dan Composite Reability dengan kriteria nilai masing-masing variabelnya lebih dari 0,70.

Inner model (model structural)

1. Uji Determinan

Uji determinan atau analisis varian (R^2) memperlihatkan besaran variasi dalam variabel dependen yang dapat digambarkan oleh variasi independent serta mengukur seberapa baik variasi dalam variabel dependen tersebut. R-square akan bernilai 0 hingga 1, dimana nilai 1 menunjukkan akurasi yang tinggi artinya variabel independent memberikan pengaruh yang signifikan kepada variabel dependen.

2. Koefisien Jalur / *Path Coeficients*

Koefisien jalur memperlihatkan kekuatan pengaruh dari suatu variable terhadap variabel – variabel lainnya serta arah hubungan langsung antara variable didalam sebuah model. Koefisien jalur bernilai antara -1 sampai 1, dimana nilai positif menunjukkan hubungan yang searah artinya peningkatan nilai variabel independent akan meningkatkan variabel dependen sedangkan nilai negative menunjukkan hubungan berlawanan arah yang artinya peningkatan nilai variabel independent akan menurunkan variabel dependen. Dari sini akan terlihat sejauh mana variabel independent akan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan peneliti dengan maksud meramalkan keadaan baik naik atau turunnya variable dependent bila satu atau lebih variable independent dimanipulasi atau dinaik-turunkan, demikian pendapat Sugiyono (2019 : 262). Analisis ini memperlihatkan model dan hubungan antara variable dependen dengan beberapa variable independent, sehingga dapat membantu peneliti untuk membuat ramalan yang lebih akurat. Pada penelitian ini, akan terlihat hubungan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran.

Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis dengan SmartPLS, data diolah dengan metode bootstrapping (gambar 4.2) dengan memperhatikan hasil t-statistic serta p-value yang dihasilkan (table 4.13). Melalui bootstrapping ini akan terlihat besaran dan signifikansi pengaruh antar variabel. T-value memiliki besaran 1,96 yang artinya jika nilai t-value lebih besar dari 1,96 maka hubungan antar variabel tersebut signifikan dan dapat digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis. P-value memiliki besaran 0,05 artinya jika nilai p-value bernilai lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima sebagai signifikan.

Pengujian Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel independent (X_1 , X_2 , dan X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka perhitungan menggunakan Uji F atau Uji Simultan. Pengaruh simultan dihitung dengan F-Square (F^2) dan hasilnya dibagi kedalam interpretasi standar yaitu jika $F^2 \geq 0,02$ maka pengaruh rendah, jika $F^2 \geq 0,15$ maka pengaruh sedang (moderat), dan jika $F^2 \geq 0,35$ maka pengaruh tinggi. Rumusan perhitungan seperti berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 : koefisien determinan (R-square)

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SEM

Penelitian ini dianalisis dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM). Dalam pengujian outer model, SEM digunakan untuk menilai validitas dan reabilitas sebuah indikator terhadap variabel latennya. Pengujian dilakukan dengan uji validitas konvergen dan diskriminan serta uji reabilitas seperti cronbach's alpha dan composite reability. Pengujian inner model menggunakan analisis dengan teknik Partial Least Squares (PLS). PLS bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel independent yang memiliki korelasi tinggi, serta hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen. Pengujian inner model dilakukan dengan uji determinan (uji R-Square) dan Path Coeficient.

Outer Model (Model Pengukuran)

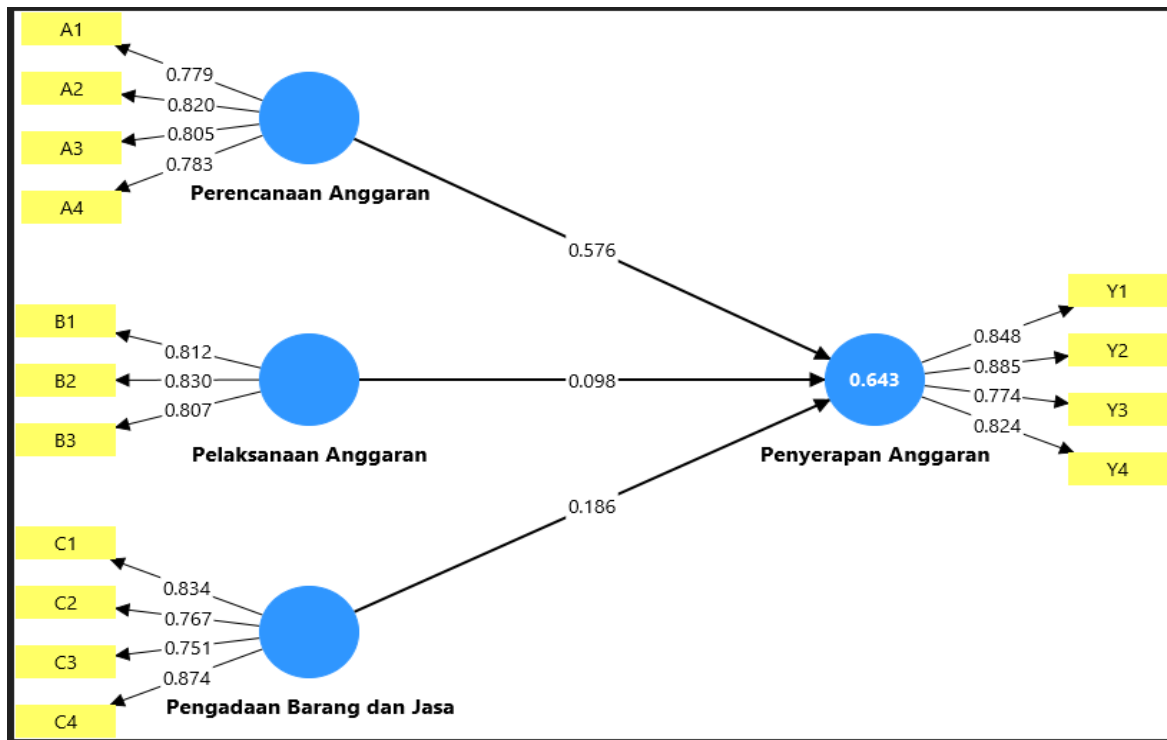
1. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Indikator yang dinyatakan valid jika memiliki nilai loading faktor minimal 0,70. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 4, didapatkan loading faktor seperti pada table 1 dan gambar 1 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator yang terdapat pada setiap variabel memiliki nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti seluruh indikator memiliki tingkat validitas yang tinggi dan memenuhi validitas.

Tabel 1. Nilai Loading Faktor

	Pelaksanaan Anggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Penyerapan Anggaran	Perencanaan Anggaran
A1				0,779
A2				0,820
A3				0,805
A4				0,783
B1	0,812			
B2	0,830			
B3	0,807			
C1		0,834		
C2		0,767		
C3		0,751		
C4		0,874		
Y1			0,848	
Y2			0,885	
Y3			0,774	
Y4			0,824	

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4, 2025



Gambar 1. Koefisien Jalur (Path Coefficient)

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

2. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Perhitungan validitas diskriminan diawali dengan penilaian terhadap masing-masing variable yang memenuhi kriteria nilai AVE, dan dalam penelitian ini hasilnya diurai sebagai berikut :

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Pelaksanaan Anggaran	0,667
Pengadaan Barang dan Jasa	0,653
Penyerapan Anggaran	0,695
Perencanaan Anggaran	0,635

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variable bernilai diatas 0,50 yang artinya semua indikator memenuhi kriteria AVE. Nilai AVE terendah 0,635 pada variable perencanaan anggaran dan tertingginya 0,695 pada variabel penyerapan anggaran.

a. *Cross loading*

Cross loading dilakukan dengan cara melihat nilai loading masing-masing variabel dengan indikatornya dan juga indikator dengan variabel lainnya. Variabel dikatakan valid secara diskriminan jika nilai loading indikator pada variabelnya lebih tinggi daripada nilai loading indikator pada variabel lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 4, didapatkan *cross loading variable* seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Cross Loading Variable

	Pelaksanaan Anggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Penyerapan Anggaran	Perencanaan Anggaran
A1	0,618	0,646	0,592	0,779
A2	0,500	0,663	0,576	0,820
A3	0,629	0,504	0,636	0,805
A4	0,648	0,525	0,687	0,783
B1	0,812	0,422	0,561	0,557
B2	0,830	0,620	0,556	0,628
B3	0,807	0,652	0,499	0,674
C1	0,701	0,834	0,653	0,639
C2	0,387	0,767	0,407	0,588
C3	0,438	0,751	0,518	0,461
C4	0,625	0,874	0,549	0,659
Y1	0,493	0,605	0,848	0,724
Y2	0,576	0,563	0,885	0,651
Y3	0,420	0,440	0,774	0,549
Y4	0,693	0,613	0,824	0,676

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa didapatkan nilai loading indikator pada masing-masing variabelnya memiliki nilai lebih besar daripada nilai loading indikator terhadap variable lainnya. Dengan demikian, semua indikator variable memenuhi kriteria validitas diskriminan.

b. *Fornell – Larcker Criterion*

Fornell – Larcker Criterion dilakukan dengan cara menghitung akar kuadrat AVE untuk setiap variable harus lebih besar dari korelasi antara variable tersebut dengan variable lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil korelasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. Fornell – Larcker Criterion

	Pelaksanaan Anggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Penyerapan Anggaran	Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan Anggaran	0,817			
Pengadaan Barang dan Jasa	0,687	0,808		
Penyerapan Anggaran	0,661	0,673	0,834	
Perencanaan Anggaran	0,756	0,729	0,786	0,797

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai akar kuadrat setiap variabel lebih besar daripada korelasi antara variabel tersebut dengan variabel lainnya. Misalnya akar kuadrat perencanaan anggaran lebih besar dari pada korelasi perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan

jasa, dan penyerapan anggaran. Hal ini menjelaskan bahwa semua variabel memenuhi kriteria validitas diskriminan.

c. *Heteroit* – Monotrait Ratio (HTMT)

Heteroit – Monotrait Ratio (HTMT) diukur untuk menguji bahwa setiap variabel memiliki perbedaan konseptual dan tidak tumpang tindih. HTMT dilakukan dengan melihat nilai ambang batasnya yaitu 0,90 untuk variabel dapat dikatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan, seperti yang terlihat dalam table berikut :

Tabel 5. Heteroit – Monotrait Ratio (HTMT)

	Pelaksanaan Anggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Penyerapan Anggaran	Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan Anggaran				
Pengadaan Barang dan Jasa	0,852			
Penyerapan Anggaran	0,815	0,776		
Perencanaan Anggaran	0,968	0,895	0,933	

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Berdasarkan table 5 dapat dilihat bahwa hanya 2 korelasi yang dapat memenuhi kriteria variabel diskriminan yaitu korelasi pelaksanaan anggaran dengan penyerapan anggaran bernilai 0,968 dan korelasi penyerapan anggaran dengan penyerapan anggaran bernilai 0,933. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran merupakan variabel yang memenuhi kriteria variabel diskriminan.

3. Uji Realibilitas atau Uji Keandalan

Hasil dari pengolahan data pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
Pelaksanaan Anggaran	0,750	0,752	0,857	Valid
Pengadaan Barang dan Jasa	0,824	0,842	0,882	Valid
Penyerapan Anggaran	0,853	0,862	0,901	Valid
Perencanaan Anggaran	0,809	0,810	0,874	Valid

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Berdasarkan table 6 hasil pengujian didapatkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai Cronbach's alpha dan Composite reability diatas 0,70 yang artinya semua variabel dinyatakan andal.

Inner Model (Model Struktural)

1. Uji Determinan atau Analisis Varian (R^2)

Hasil dari pengolahan data pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.12 berikut :

Tabel 7. Analisis Varian (R^2)

	R-square	R-square adjusted
Penyerapan Anggaran	0,643	0,629

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Hasil uji determinan menunjukkan nilai R-square penyerapan anggaran sebesar 0,643 yang artinya variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa mampu menjelaskan 64 % variasi pada variabel penyerapan anggaran, sedangkan 36 % sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti pada penelitian ini.

2. Evaluasi koefisien jalur (*Path Coefficient*)

Dari gambar 4.1 koefisien jalur yang didapat membentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,576 X_1 + 0,098 X_2 + 0,186 X_3 + \sum (1 - 0,643)$$

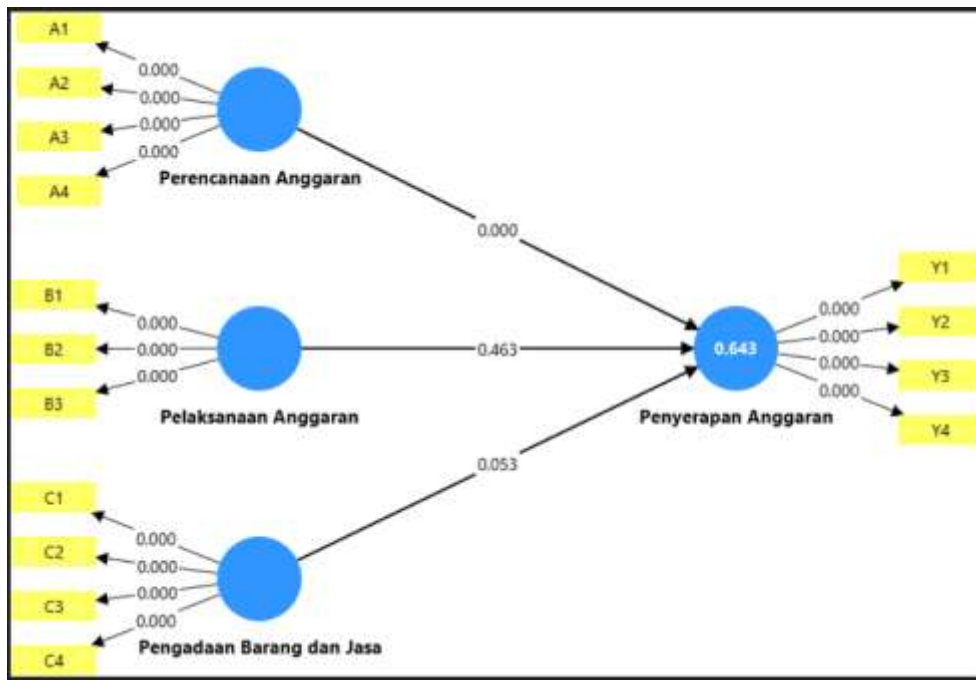
Keterangan :

- Y = Penyerapan Anggaran
- X_1 = Perencanaan Anggaran
- X_2 = Pelaksanaan Anggaran
- X_3 = Pengadaan Barang dan Jasa

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Jika perencanaan anggaran meningkat satu satuan dimana pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tetap, maka penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 0,567 begitupun sebaliknya jika perencanaan anggaran menurun satu satuan dimana pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tetap, maka penyerapan anggaran akan menurun sebesar 0,567.
2. Jika pelaksanaan anggaran meningkat satu satuan dimana perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tetap, maka penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 0,098 begitupun sebaliknya jika pelaksanaan anggaran menurun satu satuan dimana perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tetap, maka penyerapan anggaran akan menurun sebesar 0,098.
3. Jika pengadaan barang dan jasa meningkat satu satuan dimana perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran tetap, maka penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 0,186 begitupun sebaliknya jika pengadaan barang dan jasa menurun satu satuan dimana perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran tetap, maka penyerapan anggaran akan menurun sebesar 0,186.

Model koefisien yang terbentuk dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan memperlihatkan hubungan positif antara variabel independent (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran).



Gambar 2. Bootstrapping

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pada penelitian ini, didapatkan hasil bootstrapping seperti gambar berikut :

Tabel 8. Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pelaksanaan Anggaran -> Penyerapan Anggaran	0,098	0,097	0,133	0,734	0,463
Pengadaan Barang dan Jasa -> Penyerapan Anggaran	0,186	0,199	0,096	1,932	0,053
Perencanaan Anggaran -> Penyerapan Anggaran	0,576	0,574	0,127	4,529	0,000

Sumber : Data diolah SmartPLS versi 4, 2025

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 2 diperoleh hasil pengujian hipotesis seperti berikut :

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Dari tabel 8 didapatkan bahwa t-statistik bernilai $4,529 > 1,96$ dan p-value bernilai $0,00 < 0,05$ maka perencanaan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan perencanaan anggaran sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah OPD dalam mencapai kinerjanya. Perencanaan anggaran menggambarkan semua kebutuhan organisasi sepanjang 1 tahun kedepan dan keterkaitan dengan capaian kinerja organisasi yang berdampak pada penghasilan ASN. Oleh sebab itu, perencanaan

anggaran yang baik akan menghasilkan penyerapan anggaran yang tinggi. Tanggapan responden yang setuju atas perencanaan anggaran dapat dilihat dari nilai mean yang sangat tinggi dengan indikator tertinggi yaitu aktivitas-aktivitas yang disusun untuk mendukung sasaran kinerja dan indikator terendah yaitu kebutuhan anggaran terdistribusi dengan baik setiap bulannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ledy, dkk (2017), Yolla dan Annie (2022), serta Dewi dan Sapna (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Dari tabel 8 didapatkan bahwa t-statistik bernilai $0,734 < 1,96$ dan p-value bernilai $0,463 > 0,05$ maka pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Indikator mekanisme pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai kontrak kerja mendapat tanggapan tertinggi, hal ini memperlihatkan proses pembayaran atas pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kontrak kerja. Indikator kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan mendapat tanggapan yang tinggi, hal ini memperlihatkan kepatuhan OPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan diawal. Indikator pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran mendapat tanggapan yang tinggi, hal ini memperlihatkan bahwa OPD sudah melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Ketiga indikator dalam pelaksanaan anggaran memang memiliki nilai tanggapan yang sangat tinggi artinya pelaksanaan anggaran sudah dilakukan dengan baik, namun hal ini tidak dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menarik untuk dilakukan pendalaman guna mendapat pandangan dari pihak terkait dalam hal ini dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang diwakilkan oleh bapak Samuel dan bapak Fhadhliansyah selaku Auditor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Narasumber menyampaikan beberapa tanggapan terkait hasil penelitian yang diolah dengan SmartPLS versi 4, diantaranya :

- Pelaksanaan anggaran tidak mempengaruhi penyerapan anggaran diperkirakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah diberikan target penyerapan anggaran sejak awal, maka dalam perencanaannya dibuat mudah untuk direalisasikan/diserap dan kegiatan yang sekiranya sulit untuk direalisasikan maka tidak masuk dalam perencanaan mereka. Hal ini berakibat bahwa pelaksanaan anggaran memang berjalan dengan baik karna sesuai perencanaan namun fokus dari penganggaran bukannya pelaksanaannya tetapi perencanaan dan penyerapannya.
- Pelaksanaan anggaran diyakini pasti akan terlaksana dengan baik sesuai perencanaan. Hal ini berjalan sebagai siklus keuangan pemerintah daerah yang rutin dan berulang setiap tahunnya. Rutinitas ini menjadi hal yang biasa bagi SKPD dalam melaksanakan anggarannya.
- Pelaksanaan anggaran merupakan tindak lanjut dari perencanaan anggaran, sehingga kepastian bahwa anggaran dapat dikerjakan sudah diperkirakan sejak awal

perencanaan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi baru, apakah pelaksanaan anggaran merupakan faktor penghubung antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran dan bukan faktor independent atas penyerapan anggaran, namun hal ini masih perlu dilakukan penelitian selanjutnya.

- Pelaksanaan anggaran yang tidak mempengaruhi penyerapan anggaran dalam penelitian ini, bisa dipengaruhi oleh karakter SKPD/UKPD sebagai objek penelitian yang beragam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya. Bentuk SKPD sebagai pemberi hibah bansos, pelaksanaan anggaran dapat terlaksana dengan optimal karena pemberian hibah bansos sesuai dengan perencanaannya, maka pelaksanaan anggaran dan penyerapannya dapat terlaksana dengan optimal. Bagi UKPD kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan rutin sepanjang tahun, pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas rutin dengan pola pelaksanaan yang sudah dipahami oleh unit kerja kecamatan dan kelurahan, maka pelaksanaan anggaran dan penyerapannya dapat terlaksana dengan optimal. Bagi SKPD dinas teknis, dengan anggaran yang cukup besar, pelaksanaan anggaran dapat dilakukan jika sudah melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan anggaran dan penyerapannya sesuai dengan hasil pengadaan barang dan jasa. Karakter SKPD/UKPD yang berbeda-beda memberikan tanggapan yang berbeda-beda pula atas pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rika Septi Rahmawati, Jouzar Faroug Ishak (2020), Noordiana Fourqoni Ardinne, dkk (2020), Fadlina Almi, dkk (2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

3. Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, seperti pada Tabel 8 terlihat t-statistik bernilai $1,932 < 1,96$ dan p-value bernilai $0,053 > 0,05$ yang artinya pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Indikator kualitas selalu diperhatikan mendapat tanggapan tertinggi, hal ini memperlihatkan proses pengadaan barang dan jasa memperhatikan kualitas barang ataupun jasa yang akan diadakan. Indikator proses pengadaan barang dan jasa memperhatikan efektivitas dan efisiensi mendapatkan tanggapan yang sangat tinggi, hal ini memperlihatkan efektivitas dan efisiensi juga diperhatikan oleh pihak OPD maupun pejabat pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan. Indikator pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan biaya yang sudah direncanakan mendapatkan nilai sangat tinggi, hal ini memperlihatkan biaya atau anggaran yang digunakan dalam proses pengadaan memang sudah direncanakan sejak awal. Indikator proses pengadaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sejak awal juga mendapat tanggapan yang sangat tinggi, hal ini memperlihatkan jadwal pengadaan barang dan jasa juga sudah direncanakan sejak awal dan tidak mendadak. Keempat indikator dalam pengadaan barang dan jasa memang memiliki nilai tanggapan yang sangat tinggi artinya pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

sudah dilaksanakan dengan namun hal ini tidak dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menarik untuk dilakukan pendalaman guna mendapat pandangan dari pihak terkait dalam hal ini dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta yang diwakilkan oleh ibu Farah selaku Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Narasumber menyampaikan pengadaan barang/jasa berfokus pada efisiensi artinya tidak semua anggaran harus direalisasikan sepanjang outcome dapat tercapai dengan harga negosiasi. Pengadaan barang/jasa juga berfokus pada *value for money* yang artinya penggunaan anggaran disandingkan dengan manfaat yang akan diterima dari anggaran tersebut. Beberapa tanggapan narasumber terkait hasil penelitian yang diolah dengan SmartPLS versi 4, diantaranya:

- Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, hal ini dimungkinkan karena sejak awal perencanaan OPD sudah memilih SHS yang tepat untuk selanjutnya proses pengadaan barang/jasa akan berlangsung dengan baik dan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran terprediksi akan optimal. Optimisme ini membentuk keyakinan bahwa dengan SHS yang tepat akan membentuk harga yang relevan dalam proses pengadaan barang/jasa dan negosiasi berjalan dengan baik sehingga penyerapan anggaran akan optimal sesuai dengan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa menjadi alur yang harus dilalui memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa yang dipilih oleh Pengguna Anggaran (PA) yang ada dimasing - masing SKPD, hal ini berefek pada kinerja PP dalam pengadaan barang/jasa kekurangan independensinya karena adanya *conflic of interest* yang dapat berakibat pada negosiasi harga yang kurang optimal, sehingga hasil pengadaan disesuaikan dengan perencanaan. Pengadaan dengan harga merujuk pada perencanaan, maka penyerapannya akan optimal.
- Pengadaan barang/jasa yang tidak mempengaruhi penyerapan anggaran dapat disebabkan oleh target yang sudah ditentukan sejak awal perencanaan anggaran, maka OPD akan melakukan penyerapan dengan maksimal sesuai perencanaan supaya target dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Noordiana Fourqoni Ardinne, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan rumus, maka perhitungan untuk F sebagai berikut :

$$\begin{aligned} F &= \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \\ &= \frac{0,643}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (1 - 0,643) / (79 - 3 - 1) \\
= & \frac{0,214}{0,357 / 75} \\
= & \frac{0,214}{0,00476} \\
= & 44,95
\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel F kolom ke 3 dan baris ke 74, diketahui nilai F sebesar 2,728.

Dari uji simultan, didapatkan F hitung $44,95 > F$ tabel 2,728 maka perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penerapan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang & jasa yang dilakukan secara bersamaan sesuai dengan ketentuan memiliki pengaruh bagi penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa adalah satu kesatuan dalam APBD yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tanggapan responden terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kategori sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta mengawali penyusunan APBD dengan perencanaan yang matang serta mengukur kemampuan potensi ASN dalam melaksanakan perencanaan sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal. Pelaksanaan anggaran juga berjalan dengan baik, di mana setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan sangat baik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan untuk menunjang terwujudnya pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga memenuhi KPI Pemerintah atas pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara parsial, perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, yang menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah baik dalam penyusunan APBD dan setiap organisasi perangkat daerah telah memahami serta menjalankan perencanaan anggaran dengan baik. Namun, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yang berarti bahwa kedua variabel tersebut meskipun telah dilaksanakan dengan baik, belum cukup untuk memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, secara simultan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yang menunjukkan bahwa jika ketiga faktor tersebut dilakukan secara optimal dan terintegrasi, maka akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

REFERENSI

- Aprillia, N. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan APBD. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Dewi Sartika & Sapna Julita Roza. (2024). Hubungan Perencanaan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15-29.
- Dion & Eka. (2022). Studi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 8(2), 35-48.
- Fadlina, A., dkk. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45-58.
- Heriberta, dkk. (2018). Perencanaan Anggaran dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 12-27.
- Kaniya, dkk. (2022). Hubungan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penyerapan Anggaran. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 40-53.
- Ledy, S., Jullie, J., & Jessy. (2017). *Perencanaan Anggaran: Konsep dan Implementasi di Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Indonesia.
- Muhamad Syahwildan & Irma Damayanti. (2022). Efektivitas Perencanaan Anggaran di OPD. *Jurnal Ekonomi Publik*, 7(2), 50-62.
- Noordiana, dkk. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Efisiensi Penyerapan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6(1), 24-38.
- Nurfadila Rizky Pratiwi, dkk. (2023). Implementasi Perencanaan Anggaran pada Pemerintah Provinsi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 33-48.
- Raden & Heni. (2025). Analisis Faktor-faktor Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 60-75.
- Rika & Jouzar. (2020). Analisis Pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(2), 15-30.
- Su Voon Khoo, dkk. (2024). Evaluasi Perencanaan dan Penyerapan Anggaran. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(3), 22-37.
- Yolla Safpremi & Annie Mustika Putri. (2022). Analisis Faktor-faktor Penyerapan Anggaran. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(3), 67-79.
- Zakiah, dkk. (2021). Perencanaan Anggaran dan Efektivitas Penyerapan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(1), 23-35.